

## SINOPSIS

Kawasan Wisata Pangandaran yang merupakan kawasan andalan dan sumber pendapatan terbesar kedua setelah agribisnis harus mengalami keterpurukan yang parah. Hal tersebut disebabkan oleh musibah gempa tektonik dan tsunami yang melanda kawasan Pantai Pangandaran dan sekitarnya pada 17 Juli 2006 yang lalu. Dan berdampak terhadap menurunnya jumlah pengunjung dan pendapatan asli daerah, terutama masyarakat Pangandaran yang mengalami trauma psikologis. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Sektor Pariwisata Pangandaran Pasca Tsunami. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana kebijakan pembangunan sektor pariwisata Pangandaran pasca tsunami yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, UPTD Pengelola Objek Wisata Ciamis Selatan, Kabupaten Ciamis.

Penelitian ini menggunakan model survei kualitatif. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi langsung (*natural observation*) dan wawancara mendalam (*indepth review*). Sedang data sekundernya diperoleh dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa buku-buku, jurnal dan majalah yang berisi tentang pendapat, teori, dalil/hukum dan lain-lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*), (2) sajian data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing*).

Dari hasil perolehan data di lapangan, penulis berhasil menemukan beberapa data mengenai kebijakan pembangunan sektor pariwisata Pangandaran pasca tsunami yang dilakukan oleh Disbudpar Ciamis, yakni : tanggap darurat dilakukan selama 14 hari, *recovery* (pemulihan) dilakukan selama 3-6 bulan, *development* (pengembangan) selama 1-5 tahun, *Reconstruction* (Rekontruksi) selama 6 bulan – 1 tahun. Saat ini, kebijakan tersebut masih dalam tahap *recovery* (pemulihan) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sedang menyusun masterplan kawasan Pangandaran yang baru. Namun, kebijakan yang dilakukan oleh Disbudpar Kabupaten Ciamis dalam memulihkan sektor pariwisata Pangandaran dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh lambannya proses *recovery* atau pemulihan yang sedang dilaksanakan.

Dari temuan di lapangan tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya masterplan yang baru dan berbagai program dilaksanakan dengan baik, maka kawasan wisata Pangandaran akan kembali menjadi kawasan wisata andalan dan sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, penulis berharap pemerintah daerah dan masyarakat berperan aktif dalam pembangunan sektor pariwisata Pangandaran pasca tsunami. Selain itu permasalahan-permasalahan seperti penataan PKL dan penataan objek wisata yang semrawut sebelum terjadinya tsunami dapat diselesaikan dengan baik